



KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 34 / K / 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 tahun 157);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 23 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- KEEMPAT : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara pada Pos masing-masing SKPD Pengusul Ranperda.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal : 23 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ketua,

ttd

BASKAMI GINTING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Sumatera Utara ;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA,

AFIFI LUBIS, SH
PEMBAINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 34/K/2021
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

NO.	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANPERDA TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Komisi A)
2.	RANPERDA TENTANG STANDARISASI OBJEK WISATA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Komisi B)
3.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN PIHAK KETIGA	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Komisi C)
4.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN EKOSISTEM MANGROVE DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Komisi D)
5.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Komisi E)
6.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Bapemperda DPRDSU)
7.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
8.	RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

	PERMUKIMAN (RP3KP) PROVINSI SUMATERA UTARA	
9.	RANPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
10.	RANPERDA TENTANG INTEGRASI PETERNAKAN SAPI POTONG DENGAN KEBUN KELAPA SAWIT	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
11.	RANPERDA TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
12.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
13.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
14.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
15.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
16.	RANPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA, PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA DAN PT DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

17.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA, TBK	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
18.	RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
19.	RANPERDA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RPUM) PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
20.	RANPERDA TENTANG KEPEMUDAAN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
21.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENAGALISTRIKAN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

**DAFTAR RANCANGAN PERDA PROPEMPERDA TAHUN 2021 YANG
SUDAH DALAM TAHAPAN PEMBAHASAN UNTUK DILANJUTKAN PADA
TAHUN 2022 (CARRY OVER)**

NO.	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3.	RANPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
4.	RANPERDA TENTANG RANPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
5.	RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
6.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
7.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
8.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
9	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA.	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR RANCANGAN PERDA KUMULATIF TERBUKA		
NO.	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ket u a,

ttd

BASKAMI GINTING

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA,

★ SETWAN ★
H. AFIFT LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003